BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech P2P Lending*) melalui penerbitan regulasi seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. Pengawasan ini mencakup pendaftaran dan perizinan penyelenggara, dengan hasil bahwa per 11 Maret 2025, sebanyak 101 penyelenggara telah terdaftar dan berizin di OJK, termasuk KoinWorks, Investree, dan Amartha (OJK, 2025). Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyelenggara, sementara upaya represif meliputi pemblokiran aplikasi ilegal bersama Satgas Waspada Investasi, yang hingga 2023 telah memblokir lebih dari 1.000 aplikasi ilegal (OJK, Press Release 2023). Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena masih maraknya penyelenggara ilegal, pelanggaran seperti penyalahgunaan data pribadi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi OJK dalam menghadapi perkembangan *fintech* yang pesat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penguatan sistem pengawasan yang perlu diperbaiki.

OJK menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi *fintech P2P Lending*, antara lain:

- a) maraknya penyelenggara ilegal yang sulit dideteksi karena kemudahan membuat platform digital;
- b) perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan respons regulasi;
- c) rendahnya kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi, termasuk aturan batasan pendanaan dalam SEOJK No. 19/2023;
- d) penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan tidak manusiawi; serta
- e) minimnya literasi keuangan masyarakat yang meningkatkan kerentanan terhadap *fintech* ilegal.

Mekanisme yang diterapkan meliputi pengaturan melalui POJK dan SEOJK, koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk tindakan preventif (edukasi), kuratif (pemanggilan dan peringatan), dan represif (pemblokiran aplikasi serta penegakan hukum). Meskipun mekanisme ini telah menunjukkan hasil, seperti pemblokiran ribuan aplikasi ilegal, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya sistem pemantauan terpusat dan koordinasi lintas sektoral yang optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri *fintech* yang aman dan terpercaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

a). Peningkatan Kapasitas Teknologi Pengawasan

OJK disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan terpusat berbasis teknologi, seperti platform pelaporan digital terintegrasi, guna melacak kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi, termasuk batasan pendanaan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 19/2023. Sistem ini dapat mempercepat deteksi penyelenggara ilegal dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

b). Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Masif

OJK perlu memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan kampanye luar ruang, untuk meningkatkan literasi keuangan. Edukasi ini harus fokus pada cara mengenali fintech legal yang terdaftar di OJK (contohnya melalui situs www.ojk.go.id) dan risiko penggunaan fintech ilegal, sehingga mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik merugikan.

c). Penegakan Hukum yang Konsisten dan Terkoordinasi

OJK perlu memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia, dan perbankan untuk

mempercepat pemblokiran aplikasi ilegal, memutus akses keuangan, dan menindak pelaku fintech ilegal secara hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera serta mendukung keberlanjutan industri fintech yang sehat.

d). Optimalisasi Peran Satgas Waspada Investasi dan AFPI

Satgas Waspada Investasi harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi tawaran investasi ilegal secara real-time, sementara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) perlu meningkatkan perannya dalam mengedukasi anggota dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan konsumen.

e). Penyempurnaan Regulasi Berbasis Inovasi

Mengingat cepatnya perkembangan teknologi seperti AI dan blockchain dalam fintech, OJK disarankan untuk terus menyempurnakan regulasi dengan pendekatan adaptif. Misalnya, menetapkan standar teknis untuk analisis kredit dan perlindungan data yang lebih ketat, sehingga regulasi tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan baru di industri P2P Lending.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bisdang Sigalingging, 2020, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan:

Umsu Press.

Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba

Humanika.

Jamaluddin, 2023, *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*,

Banyumas: Wawasan Ilmu.

Kasiyanto Kasemin, 2016, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta:

Prenada Media.

Kusumaningtuti S. Soetiono, 2017, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri*

Jasa Keuangan, Jakarta: OJK.

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: Pt. Refika Aditama.

Mukhidin, 2024, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah*

Atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online, Pekalongan: Nem.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung:

Alfabeta.

Sutedi, A. 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Tim Elex Media, 2015, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa*

Keuangan, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada

Media.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Yang dirubah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending) Berbasis Online Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

C. SUMBER LAIN

Abdullah, A. 2021. *Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta*. *JESI (jurnal ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.

- Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi, 2020, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)*, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>, e-Journal, hlm, 16-19.
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, 2020, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (FINTECH)*, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>, e-Journal, hlm, 147-159
- Nurul Hidayah, “*Hakika tManusia sebagai Makhluk Sosial*”, <https://www.ruangguru.com/blog/manusia-sebagai-makhluk-sosial>. diakses pada tanggal 19 Mei 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang Terdaftar di OJK*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perkuat Satgas Waspada Investasi*, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 18:12 WIB
- Subhan Zein, 2019, *Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crrdfunding) di Indonesia*, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/338>, E-Journal, Hlm, 120-122.
- Wigati Taberi Asi, *Dasar Hukum Peminjaman Online di Indonesia*, <https://heylaw.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Press Release: OJK Tutup 1.000 Fintech Ilegal di 2023*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.